

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan I). CV. Syakir Media Press.
- Ahmadi Bi Rahmani, N. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. FEBI UIN-SU Press.
- Alfurkaniati, Safrida, L., Nasirwan, Harmain, H., Nurlaila, Lande, A., Limaryani, S., Sejati, F. R., Muthmainnah, Ermawati, Y., & Safrita. (2017). *Pengantar Akuntansi 1* (Cetakan Ke). CV. Madenatera.
- Alim, M., & Ida. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 7(1), 81–88.
- Andini, I. Y., Arfiyanto, D., & AR, M. M. S. (2020). Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik. *Bisnis & Akuntansi*, 10(1), 63–76.
- Andreani, Y., & Syafina, L. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 203–209. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.771>
- Anggun, S., & Pinilih, G. (2017). Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Mimbar Hukum*, 29(1), 69–81.
- Astuti, W. (2010). *Pengantar Akuntansi Keuangan*. Perdana Publishing.
- Azhar, F., & Kushandajani. (2018). Pengelolaan Keuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jepara Sebagai Upaya Peningkatan Kepercayaan Publik. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Sumatera Utara Medan Area*, 6(2), 106. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1617>
- Bastian, I. (2007). *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Erlangga.
- Dahlia, Nurhidayah, & Listiawati, N. (2019). Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Sebatik*, 23(2), 292–300.
- Dalimunthe, A. A., & Sidabutar, R. R. (2020). *Research Methodology*.
- Hadin, A. F. (2015). *Transparansi dan Akuntabilitas Sumbangan untuk Partai Politik*. 65–75.

- Haris, S. (2020). *Menuju Reformasi Partai Politik* (A. Tarigan (ed.)). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harmain, H., Anggriyani, Rasidah, Nurlaila, Olivia, H., Farina, D., Wahyudi, H., & Syafina, L. (2019). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Madenatera.
- Juliestari, M. A. (2018). Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Sebagai Dasar Good Political Party Governance. *Repository Uin Alauddin*.
- Jurdi, F. (2020). *Pengantar Hukum Partai Politik* (Cetakan Pe). Kencana.
- Kasmir, D. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Gramedia.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*. PT Grasindo Anggota Ikapi.
- Malia, E. (2021). *Penerapan Good Political Governance Sebagai Upaya Transparansi Dana Partai Politik*. 11(1), 43–54.
- Mardenis. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mufazzal, & Abidin, Z. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA (Studi Kasus Lima Partai Politik Dominan Di Parlemen Aceh Tahun Anggaran 2014). *Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2, 406–427.
- Natasyah, O. C. (2018). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi DPD Partai Golkar Kota Surabaya Terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik. *Repository Unair*.
- Ningsih, Y. (2012). *Kitab Al Qur'an Al Fatih Tafsir Per Kata Tajwid Kode Arab*. PT Insan Media Pustaka.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- R, H. (2021). PENGUNGKAPAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS KONSEP METAFORA AMANAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS (Studi Pada Pesantren Tahfihz ul Qur'an Al-Wadi Al-Mubarak). *Repository Uin Alauddin*.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Sahman Sitompul, M., Harahap, N., & Harmain, H. (2015). *Akuntansi Majid* (Cetakan Pe). FEBI UIN-SU Press.

- Salim, & Syahrur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan Ke). Citapustaka Media.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Cetakan Pe). Literasi Media Publishing.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. ALFABETA.
- Suprihatini, A. (2019). *Partai Politik Di Indonesia*. Cempaka Putih.
- Suwanda, D., Junjuran, B. A., Affandi, A., & Rusliati, E. (2019). *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publi* (Cetakan Pe). PT Remaja Rosdakarya.
- Usiono. (2017). *Pancasila Dan Kewarganegaraan* (Cetakan Ke). Perdana Publishing.
- Warjio, Othman, M. F., & Ladiqi, S. (2021). *Good Party Governance: Praktik Partai Politik di Indonesia dan Malaysia dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Gerhana Publishing.
- Wibowo, E. A. (2018). Akuntabilitas Partai Politik Dan Elektabilitas Partai Politik: Studi Kasus Pada Partai Politik Peserta Pemilu Di Propinsi Diy Tahun 2014. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 31. <https://doi.org/10.21460/jrak.2018.141.297>
- Widayanti, W., Priyadi, M. P., & Ardini, L. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai (Studi Kasus di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur). *WAHANA*, 22(2), 135–156.

LAMPIRAN I

Daftar Informan Dan Hasil Wawancara

Pertanyaan wawancara berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber, adapun narasumber yang diwawancarai diantaranya adalah ketua Partai Amanat Nasional, bendahara Partai Amanat Nasional, sekretaris BAKESBANGPOL, staf bagian analisis kebijakan modal BAKESBANGPOL Kabupaten Asahan.

Hasil Wawancara 1

Nama	Drs. Syaddad Nasution, S.Pd.I
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki – Laki
Jabatan	Ketua DPD PAN Asahan 2020-2025 Ketua Komisi A di DPRD Asahan
Tanggal Wawancara	22 Mei 2022

Pertanyaan:

1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan dalam mengelola keuangan atas dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah ?

Jawab: Sejauh ini saya menjabat menjadi ketua PAN dari tahun 2019 sampai tahun 2022 partai PAN selalu memenuhi akuntabilitas laporan keuangan atas anggaran yang didapat dari APBD yang kemudian akan dilaporkan kepada BAKESBANGPOL kemudian diaudit oleh BPK dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari apa yang kami terima, namun kami tidak membuat laporan apapun selain LPJ tersebut

2. Berapa besaran bantuan dari APBN/APBD untuk setiap suara yang diperoleh oleh partai politik ?

Jawab: Partai politik itu mendapat dana bantuan apabila mendapat kursi di DPR/DPRD, maka partai politik akan berusaha sebaik-baiknya agar mendapatkan banyak suara agar dana bantuan yang didapat juga

banyak. Dana yang kami terima sesuai dengan jumlah suara yang didapat saat pemilu tahun 2019 yaitu 39.900 suara kemudian akan dikali dengan harga persuara yaitu 2.000.

3. Apa saja kegiatan partai politik yang didanai oleh pemerintah ?

Jawab: Dana yang kita dapat dari APBD tersebut kita gunakan 60% bahkan lebih untuk pendidikan politik berupa seminar, musyawarah, sosialisasi dan lain yang berhubungan dengan politik, kemudian sisanya untuk keperluan sekretariat kantor, baik dalam pemenuhan alat tulis kantor, surat menyurat, arsip dan gaji para pengurus partai PAN

4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban partai terhadap dana yang diperoleh diluar dari APBD ?

Jawab: Dana bantuan untuk partai politik itu ada empat ya, dari APBD, iuran dari kami (para anggota), dari perusahaan-perusahaan ataupun lembaga lainnya dan ada juga dari dari atasan. Untuk dana yang dari APBD itu banyaknya sesuai dengan jumlah suara yang kita dapat pada pemilu yang lalu, sedangkan iuran dari anggota akan dipotong langsung ketika kita menerima gaji. Untuk pertanggungjawabannya ya kita lakukan sesuai dengan kebutuhan politik terutama dalam pemenuhan tugas dan fungsi kita, pendidikan politik, membantu rakyat itu sudah termasuk pertanggungjawaban kita dalam menerima bantuan tersebut.

5. Apakah laporan keuangan partai politik dapat diakses oleh publik secara terbuka ?

Jawab: Dan untuk masyarakat tidak semua bisa melihat keuangan kita namun jika memang perlu dan mereka datang kekantor, kita kasi dan kita jelaskan beberapa hal yang penting. Untuk pengumuman dalam bentuk apapun kita tidak membuat karena inikan rumah tangga kita jadi tidak semua orang boleh tau masalah yang ada di dalam.

6. Bagaimana bentuk transparansi dari partai politik ?

Jawab: Untuk transparansi sendiri kita sudah transparan untuk pemerintah yaitu bakesbangpol, semua dana yang kita dapat dari APBD kita laporkan kepada mereka.

7. Apakah setiap transaksi yang terjadi memerlukan bukti transaksi ?

Jawab: Setiap transaksi apapun yang dilakukan harus ada bukti yang jelas untuk memperkuat laporan pertanggungjawaban yang kita buat, seperti foto kegiatan, kwitansi dan lain-lainnya.

Hasil Wawancara 2

Nama	Nurman Abdy Siagian, SE
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki – Laki
Jabatan	Bendahara DPD PAN Asahan 2020-2025
Tanggal Wawancara	23 Mei 2022

Pertanyaan:

1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan dalam mengelola keuangan atas dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah ?

Jawab: Pertanggungjawaban laporan keuangan kita buat dalam LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang akan diserahkan kepada pihak BAKESBANGPOL. Kita merasa bahwa dana yang kita terima sudah kita salurkan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama untuk kepentingan pendidikan politik, musyawarah, seminar dan kegiatan-kegiatan politik lainnya kemudian mengenai kesekretariatan kantor.

2. Berapa besaran bantuan dari APBN/APBD untuk setiap suara yang diperoleh oleh partai politik ?

Jawab: Dana yang kami terima sesuai dengan jumlah suara yang didapat saat pemilu tahun 2019 kemudian akan dikali dengan harga persuara yaitu 2.000 yang kesemuaan dana yang diterima untuk kepentingan pendidikan politik dan kesekretariatan partai.

3. Apa saja kegiatan partai politik yang didanai oleh pemerintah ?

Jawab: Pertama pendidikan politik, kemudian untuk kepentingan rakyat dan untuk sekretariat kantor.

4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban partai terhadap dana yang diperoleh dari selain pemerintah?

Jawab: Kita memang tidak membuat laporan lain selain LPJ tersebut, namun jika penyumbang dana menginginkan suatu laporan maka kita akan membuatnya dan menjelaskan kemana dana tersebut kita salurkan.

5. Apakah pencatatan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum untuk organisasi nonlaba yaitu ISAK No. 35 ?

Jawab: Pencatatannya kami buat seperti biasa yang dibuat oleh pemerintah untuk laporan pertanggungjawabannya, berisikan anggaran dan pengeluaran, namun kami tidak ada membuat laporan keuangan lain seperti akuntansi yang adek sebutkan.

6. Apakah laporan keuangan partai politik dapat diakses oleh publik secara terbuka ?

Jawab: Untuk secara luas tidak ada tetapi jika memang diperlukan kami akan membuka akses untuk publik.

7. Apakah setiap transaksi yang terjadi memerlukan bukti transaksi ?

Jawab: Apapun yang kita buat dilaporan pertanggungjawaban harus disertai dengan bukti transaksinya baik berupa bukti pembayaran maupun foto kegiatan.

8. Bagaimana bentuk transparansi partai politik ?

Jawab: Bentuk transparansi yang kami lakukan saat ini yaitu membuat laporan pertanggungjawaban yang akan diserahkan kepada pihak BAKESBANGPOL.

Hasil Wawancara 3

Nama	Rahman Halim A.P
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki – Laki
Jabatan	Sekretaris BAKESBANGPOL Kabupaten Asahan
Riwayat Pendidikan	Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Sumedang
Tanggal Wawancara	17 Oktober 2022

Pertanyaan:

1. Bagaimana pertanggungjawaban partai politik terhadap laporan keuangan dalam mengelola keuangan mengenai dana yang diberikan pemerintah ?

Jawab: Akuntabilitas dari partai politik di Asahan ini cukup bagus karena selama saya menjabat dalam 1 tahun saya tidak pernah mendengar adanya hasil audit dari BPK yang tidak baik. Partai politik akan menyerahkan laporan pertanggungjawabannya secara berkala yaitu 6 bulan sekali, mereka selalu memenuhi karena mereka takut jika mereka tidak memberikan laporan maka dana tidak akan disalurkan. Partai politik mendapat bantuan bukan hanya dari APBD saja namun dari anggota, sumbangan dan infaq, namun untuk laporan sumbangan lain selain dari APBD kami tidak tau menau itu urusan partai masing-masing. Walau mereka seharusnya membuat laporan keuangan tersebut agar para penyumbang lebih tau kemana uang tersebut digunakan. Seperti kami juga ada infaq tersendiri untuk partai politik, tetapi kami Cuma memeriksa dana bantuan yang berasal dari anggaran daerah karena itu duit rakyat yang harus dipertanggungjawabkan

2. Berapa besaran bantuan dari APBN/APBD untuk setiap suara yang diperoleh oleh partai politik ?

Jawab: Besaran dana bantuan yang diberikan sesuai dengan jumlah suara yang mereka terima saat pemilu, untuk tahun ini sebesar 3.438 persuara.

3. Apakah pembelanjaan partai politik sudah sesuai dengan fungsinya ?

Jawab: Di dalam laporan pertanggungjawaban yang mereka buat sudah tertera bahwa mereka melaksanakan fungsinya dengan baik.

4. Bagaimana sistem pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan partai politik selama ini, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum ?

Jawab: Saya tidak tau bagaimana persisnya mengenai akuntansi itu bagaimana, kami hanya menilai mengenai laporan pertanggungjawaban atas bantuan dari APBD. Jadi, isi laporan tersebut berisi mengenai kemana dana itu dibelanjakan mereka, seperti untuk pendidikan politik, acara-acara politik untuk kader, kemasyarakatan, administrasi kantor sampai dengan transportasi dengan bukti-bukti yang bisa kita terima. Setelah kami periksa kemudian dari BPK akan mengaudit setahun sekali.

5. Apakah laporan keuangan partai dapat diakses oleh publik secara terbuka ?

Jawab: Untuk akses laporan keuangan saya tidak tau persis karena itu adalah kebijakan dari partai masing-masing, tapi kalau kami dari BAKESBANGPOL selalu membuat akses untuk publik sebagai bentuk tanggungjawab kami orang yang memeriksa anggaran dari partai politik atas uang rakyat.

6. Bagaimana bentuk transparansi partai politik ?

Jawab: Transparansi yang dilakukan oleh partai politik kepada kami atas anggaran APBD ya dalam bentuk laporan rutin diberikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Hasil Wawancara 4

Nama	Darwin S.H
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki – Laki
Jabatan	Staf Analisis Kebijakan Modal BAKESBANGPOL Kabupaten Asahan
Riwayat Pendidikan	Universitas Asahan
Tanggal Wawancara	18 Oktober 2022

Pertanyaan:

1. Bagaimana pertanggungjawaban partai politik terhadap laporan keuangan dalam mengelola keuangan mengenai dana yang diberikan pemerintah ?

Jawab: Pertanggungjawaban yang dibuat oleh partai politik Cuma tentang laporan pertanggungjawaban tersebut karena mereka takut jika mereka tidak membuat LPJ maka dana yang seharusnya mereka terima akan diberhentikan.

2. Apakah pembelanjaan partai politik sudah sesuai dengan fungsinya ?

Jawab: Jika dilihat dari laporan yang mereka berikan kepada BAKESBANGPOL mereka telah menjalankan pembelanjaan tersebut sesuai dengan fungsi mereka sebagai partai politik.

3. Mengenai perjanjian yang diberikan pemerintah dalam memberikan dana bantuan kepada partai politik, apakah harus sesuai dengan isi perjanjian ?

Jawab: Perjanjian partai politik dengan pemerintah yaitu bagi partai politik yang mendapat kursi akan membuat proposal yang berisikan tentang rencana anggaran yang akan dilakukan mereka enam bulan kedepan, setelah itu kami pihak bakesbangpol akan memeriksa dan kemudian mencairkan dana bantuan kepada partai politik yang mendapat kursi. Setelah 6 bulan maka partai politik wajib melaporkan hasil pertanggungjawaban dana yang diterima berupa laporan pertanggungjawaban yang telah diatur pada pemendagri No. 78 Tahun 2020.

4. Bagaimana sistem pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan partai politik selama ini, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum ?

Jawab: Setau saya partai politik hanya membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) saja, karena hanya laporan itulah yang sampai kepada kami yang akan diperiksa. Seharusnya bagi partai politik juga membuat laporan yang lebih lengkap lagi yang memuat segala pemasukan dan pengeluaran mereka, bukan hanya dari APBD saja tetapi dari sumbangan-sumbangan lainnya.

5. Apakah laporan keuangan partai dapat diakses oleh publik secara terbuka ?

Jawab: Karena dana yang diterima oleh partai politik adalah dari uang rakyat dan juga dari pihak ketika maka laporan keuangan tersebut harus bisa diakses oleh publik secara terbuka agar tidak ada kecurigaan, hal itu juga akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Tapi untuk pribadi partai politik itu tergantung mereka mau membuat akses bagaimana sistemnya.

6. Bagaimana bentuk transparansi partai politik ?

Jawab: Bentuk transparansi partai politik dengan membuat laporan keuangan secara tepat waktu, jelas dan memuat semua informasi keuangan.

LAMPIRAN II

Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Partai PAN



DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL

(The National Mandate Party)

Kabupaten Asahan

Sekretariat : RUMAH PAN, Jl. Melati No. 3 Kisaran - Asahan

Email : pankabupatenasahan@gmail.com

**RENCANA PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PARTAI AMANAT NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022, BULAN JANUARI S/D JUNI 2021**

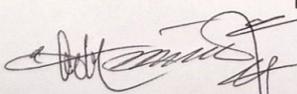
Nama Partai Politik : Partai Amanat Nasional (PAN)
NPWP : 01.866.617.2-115.002
Alamat : Jln. Melati No. 3 Kisaran
Jumlah Kursi : 5 (Lima)
Jumlah Dana : Rp. 68.349.159,-

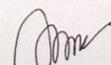
Bersama ini disampaikan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai berikut :

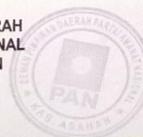
NO	RENCANA PENGGUNAAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar	-	-	-	
	b. Lokakarya	-	-	-	
	c. Dialog interaktif	Dialog dengan DPP, DPW dan DPC melalui Virtual / Zoom Meeting, DPD PAN Asahan	6 Bulan	Rp. 2.000.000,-	
	d. Sarasehan, dan	-	-	-	
	e. Workshop.	Sosialisasi dengan kader dan simpatisan PAN Kab. Asahan	6 Bulan	Rp. 39.500.000,-	
	f. Kegiatan Pertemuan Parpol Lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi parpol	-	-	-	
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum				
	a. Keperluan ATK	Perlengkapan ATK	Setiap bln	Rp. 500.000,-	
	b. Rapat Internal Sekretariat	Pembenahan Administrasi kantor	-	-	
	c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan Operasional Sekretariat	Konsultasi petugas sekretariat DPD ke DPP Jakarta.	-	-	
	d. Sewa Kantor	-	1 thn	Rp. 15.000.000,-	
	d. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat Partai Politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan	Honor Sekretariat Kantor DPD PAN Asahan	Setiap bln	Rp. 7.500.000,-	
	2. Langganan Daya dan Jasa				
	a. Telepon dan Listrik	Pembayaran Rekening	Setiap Bln	Rp. 500.000,-	
	b. Air Minum	Penyediaan air minum	Setiap rpt	Rp. 450.000,-	
	c. Jasa Pos dan Giro	Pengiriman Surat Menyurat			
	d. Surat Menyurat	Perlengkapan surat2	-	-	
	e. Media Cetak dan Elektronik	Wifi	6 Bln	Rp. 2.900.000,-	
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip	Pemeliharaan Data /Arsip Sekretariat DPD	-	-	
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor*	Pemeliharaan/penyediaan peralatan/barang2 kantor DPD.	-	-	
	JUMLAH			Rp.68.349.159,-	

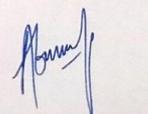
Kisaran, 12 April 2022

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN ASAHAN


Drs. SYADDAD NASUTION, S. Pd. I


NILAWATY, SE



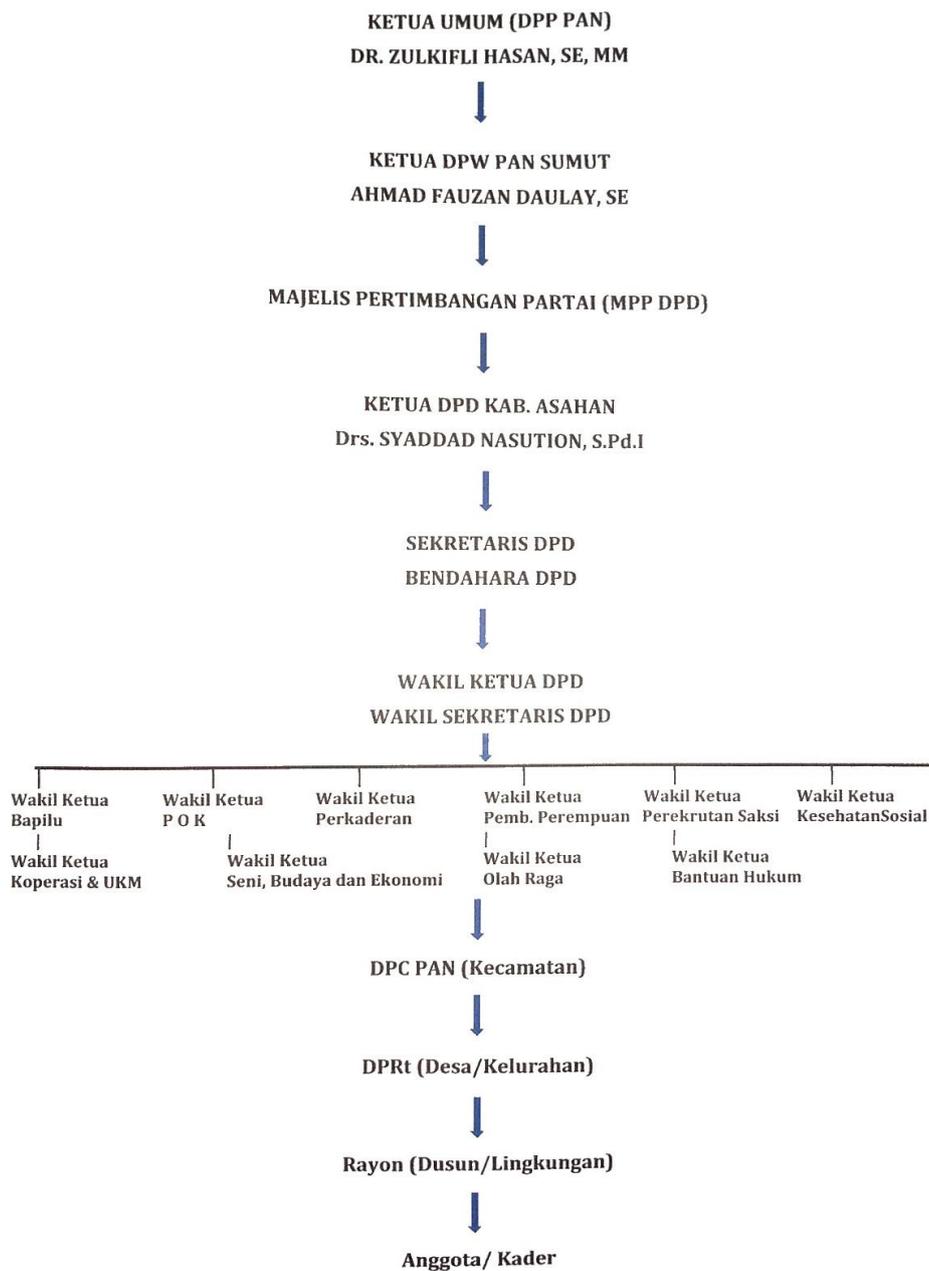

NURMAN ABDY SIAGIAN, SE

LAMPIRAN III

Struktur Organisasi DPD PAN



STRUKTUR ORGANISASI DPD PAN KABUPATEN ASAHAN PERIODE 2020 – 2025



LAMPIRAN IV
Dokumentasi Penelitian



Bapak Drs. Syaddad Nasution, S.Pd.I selaku Ketua PAN Kabupaten Asahan



Bapak Nurman Arby Siagian, S.E Selaku Bendahara PAN Kabupaten Asahan



Bapak Rahman Halim, A.P Selaku Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Asahan &
Bapak Darwin S.H Selaku Staf Analisis Kebijakan Modal Bakesbangpol
Kabupaten Asahan

LAMPIRAN V

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : 5426/EB.I/KS.02/07/2022

04 Juli 2022

Lampiran : -

Hal : **Izin Riset**

Yth. Bapak/Ibu Kepala Bapak/Ibu Kepala Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan dan Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Asahan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Sapriani
NIM : 0502182075
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Paham, 20 Mei 2000
Program Studi : Akuntansi Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Dusun IV, sei paham Kelurahan Sei paham Kecamatan Sei kepayang

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl Melati No 3 kel. Kisaran Naga, Kisaran-Asahan, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Pengungkapan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik Sebagai Dasar Good Political Party Governance (Study Kasus Pada Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 04 Juli 2022
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Marliyah, M. Ag
 NIP. 197601262003122003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Syaddad Nasution, S. Pd. I
Jabatan : Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan

Dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : Sapriani
NIM : 0502182075
Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara.

Untuk melakukan penelitian tentang **“Pengungkapan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik Sebagai Dasar Good Political Party Governance (Studi Kasus Pada Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan)”**.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Asahan, 07 Juli 2022

**Ketua Partai Amanat Nasional
Kabupaten Asahan**



Drs. Syaddad Nasution, S. Pd. I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Sapriani
2. Nim : 0502182075
3. Tpt/Tgl Lahir : Sei Paham, 20 Mei 2000
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Desa Sei Paham, Dusun IV Kab. Asahan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : MIS Nurul Huda Desa Sei Paham (2006 – 2012)
2. SMP : MTS Al Washliyah Sei Kepayang (2012 – 2015)
3. SMA : MAN Tanjung Balai (2015 – 2018)

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. RIBKA (Remaja Islam Baitul Khalil)
2. PEMTA (Persatuan Mahasiswa Tanjung Balai Asahan)